

Editor :

Suwandi, S.E., M.Ak., C.G.L., C.PI., CNFW., G.FTax., CPABC, C.FR.,  
C.AFE., CBPA, C.AP., C.CSR., C.RM., CQMS., GBSP, CFAP.,  
CTP., CPPSP.



# AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

*Pendekatan Berbasis Akrual*

Yadi Arodhiskara | Irna Triannur Lubis  
Sariana Damis | Muhammad Abdian Abdillah | Darmawan  
Fachroh Fiddin | Nanda Safarida | Febriyani Damayanti  
Purtanto | Achmad Fauzi | Rukun Santoso | Yasri Tarawiru  
Nuramalia Hasanah | Nurwani | Arham

# AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

*Pendekatan Berbasis Akrual*

Akuntansi Keuangan Daerah terutama berkaitan dengan identifikasi, pencatatan, hingga pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau wilayah provinsi). Hasil dari akuntansi ini bertujuan untuk pengambilan keputusan oleh pihak pengguna. Pendekatan berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi yang mengakui pendapatan meski belum ada penerimaan kas dalam rekening fiskal umum pemerintah/daerah; dan biaya diakui pada saat kewajiban timbul yang menyebabkan penurunan aset bersih terpenuhi meski tidak ada kas yang ditarik dari rekening bendahara.

Bab yang dibahas dalam buku ini, meliputi:

- Bab 1 Tinjauan Akuntansi Keuangan Daerah
- Bab 2 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- Bab 3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Bab 4 Standar Akuntansi Pemerintahan
- Bab 5 Akuntansi Pendapatan
- Bab 6 Akuntansi Belanja dan Beban
- Bab 7 Akuntansi Pembiayaan
- Bab 8 Akuntansi Persediaan
- Bab 9 Akuntansi Investasi
- Bab 10 Akuntansi Aset Tetap
- Bab 11 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- Bab 12 Akuntansi Dana Cadangan
- Bab 13 Akuntansi Kewajiban
- Bab 14 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Bab 15 Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



Pondok Berkarya Indonesia

☎ 0852 4179 6879

📍 BTN Puri Indah Permai Blok K No. 21, Kab. Bone, Sul-Sel



☎ 0858 5343 1992  
✉ eurekaediaaksara@gmail.com  
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-602-4817-955-1



9 786234 879551

# AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH Pendekatan Berbasis Akrua

Yadi Arodhiskara  
Irna Triannur Lubis  
Sariana Damis  
Muhammad Abdian Abdillah  
Darmawan  
Fachroh Fiddin  
Nanda Safarida  
Febriyani Damayanti  
Purtanto  
Achmad Fauzi  
Rukun Santoso  
Yasri Tarawiru  
Nuramalia Hasanah  
Nurwani  
Arham



**eureka**  
**media aksara**

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH**  
**Pendekatan Berbasis Akruai**

**Penulis** : Yadi Arodhiskara, Irna Triannur Lubis, Sariana Damis, Muhammad Abdian Abdillah, Darmawan, Fachroh Fiddin, Nanda Safarida, Febriyani Damayanti, Purtanto Achmad Fauzi, Rukun Santoso, Yasri Tarawiru, Nuramalia Hasanah, Nurwani, Arham

**Editor** : Suwandi, S.E., M.Ak., C.GL., C.PI., CNFW., C.FTax., CPABC., C.FR., C.AFE., CBPA., C.AP., C.CSR., C.RM., C.QMS., CBSP., CFAP., CTP., CPPSP.

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Via Maria Ulfah

**ISBN** : 978-623-487-955-1

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, APRIL 2023**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel: eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan pertama, 2023

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR EDITOR

### *Bismillahir Rahmanir Rahim*

Sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, tugas Editor adalah membantu dalam memperbaiki format dan sistematika penyusunan buku sehingga lebih menarik, terarah, dan mudah dipahami oleh semua kalangan pembaca. Editor tidak menekankan pada perbaikan-perbaikan yang sifatnya substansial kepada Tim Penulis, akan tetapi hanya memberikan masukan yang bertujuan agar tulisan lebih berbobot.

Editor mengucapkan terima kasih kepada penerbit Eureka Media Aksara yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah memberikan kepercayaan penuh kepada Editor untuk mengedit buku ini. Editor mengakui bahwa buku ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan buku ini pada edisi-edisi berikutnya. Kepada Tim Penulis, Editor menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas jerih payah untuk menuangkan hasil pemikirannya ke dalam sebuah tulisan ini; kedepannya diharapkan tetap produktif menulis dan menghasilkan karya-karya terbaik. Akhir kata, semoga buku ini memberikan manfaat bagi semua kalangan.

Bone, Maret 2023  
Editor,

**Suwandi**

## **PRAKATA**

Hanya Tuhan Yang Maha Esa yang pantas untuk dipuji, sedang manusia hanya makhluk lemah yang mesti bersandar kepada-Nya senantiasa.

Ada lima belas Bab dalam buku ini. Jumlah lima belas ini diselesaikan dalam waktu yang tidak sebentar. Penulis tuliskan karya terbaik untuk pembaca. Akuntansi Keuangan Daerah: Pendekatan Berbasis Akrual yang menjadi judul buku ini. Jelas buku ini sangat banyak kekurangan. Masukan dari pembaca untuk perbaikannya sangat ditunggu.

Terima kasih kepada para Penulis yang telah memberikan ide dan pemikiran dalam Buku ini. Terima kasih pada semua pihak yang tidak bisa disebutkan nama satu per satu. Semoga buku ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan menjadi amal jariah bagi penulis.

Deli Serdang, Desember 2022

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR EDITOR.....</b>	<b>iii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 TINJAUAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.....</b>	<b>1</b>
A. Reformasi Akuntansi Pemerintah.....	1
B. Definisi dan Konsep Akuntansi Keuangan Daerah ....	3
C. Tujuan dan Fungsi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah .....	5
D. Referensi.....	7
<b>BAB 2 PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN.....</b>	<b>9</b>
A. Basis Akuntansi Pemerintahan .....	9
B. Berbagai Prinsip Akuntansi Pemerintahan.....	14
C. Kebijakan Pelaporan Keuangan Pemerintahan .....	16
D. Referensi.....	17
<b>BAB 3 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH..</b>	<b>18</b>
A. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	18
B. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	19
C. Laporan Realisasi Anggaran .....	27
D. Referensi.....	29
<b>BAB 4 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.....</b>	<b>30</b>
A. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 .....	30
B. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.....	32
C. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan .....	34
D. Referensi.....	42
<b>BAB 5 AKUNTANSI PENDAPATAN.....</b>	<b>43</b>
A. Definisi dan Klasifikasi Pendapatan Pemda.....	43
B. Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Pendapatan Pemda.....	45
C. Ilustrasi Akuntansi Pendapatan Pemda.....	50
D. Referensi.....	54

<b>BAB 6</b>	<b>AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN.....</b>	<b>55</b>
	A. Definisi dan Klasifikasi Belanja dan Beban PEMDA.....	55
	B. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Belanja dan Beban PEMDA .....	57
	C. Ilustrasi Akuntansi Belanja dan Beban PEMDA .....	58
	D. Referensi .....	63
<b>BAB 7</b>	<b>AKUNTANSI PEMBIAYAAN .....</b>	<b>65</b>
	A. Definisi dan Klasifikasi Pembiayaan Pemerintah Daerah.....	65
	B. Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Pembiayaan Pemerintah Daerah.....	67
	C. Ilustrasi Akuntansi Pembiayaan Pemerintah Daerah.....	74
	D. Referensi .....	77
<b>BAB 8</b>	<b>AKUNTANSI PERSEDIAAN.....</b>	<b>78</b>
	A. Definisi dan Klasifikasi Persediaan PEMDA.....	78
	B. Pengakuan, Pengukuran dan Penilaian Persediaan PEMDA.....	81
	C. Ilustrasi Akuntansi Persediaan PEMDA .....	86
	D. Referensi .....	88
<b>BAB 9</b>	<b>AKUNTANSI INVESTASI.....</b>	<b>90</b>
	A. Definisi dan Klasifikasi Investasi PEMDA .....	90
	B. Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Investasi Pemda .....	93
	C. Ilustrasi Akuntansi Investasi Pemda.....	97
	D. Referensi .....	100
<b>BAB 10</b>	<b>AKUNTANSI ASET TETAP.....</b>	<b>101</b>
	A. Definisi dan Klasifikasi Aset Tetap PEMDA.....	101
	B. Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Aset Tetap Pemerintah Daerah.....	103
	C. Ilustrasi Akuntansi Aset Tetap Pemerintah Daerah.....	109
	D. Referensi .....	111

<b>BAB 11</b>	<b>AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan .....</b>	<b>112</b>
	A. Definisi dan Kontrak Konstruksi dalam Pengerjaan.....	112
	B. Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan Konstruksi dalam Pengerjaan .....	114
	C. Ilustrasi Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan.....	117
	D. Referensi.....	119
<b>BAB 12</b>	<b>AKUNTANSI DANA CADANGAN .....</b>	<b>121</b>
	A. Definisi dan Klasifikasi Dana Cadangan PEMDA .....	121
	B. Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Dana Cadangan PEMDA.....	123
	C. Ilustrasi Akuntansi Dana Cadangan PEMDA .....	127
	D. Referensi.....	129
<b>BAB 13</b>	<b>AKUNTANSI KEWAJIBAN .....</b>	<b>130</b>
	A. Definisi dan Klasifikasi Kewajiban PEMDA.....	130
	B. Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban PEMDA...	132
	C. Ilustrasi Akuntansi Kewajiban PEMDA.....	136
	D. Referensi.....	142
<b>BAB 14</b>	<b>PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>143</b>
	A. Pentingnya Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan PEMDA.....	143
	B. Langkah Penyusunan Laporan Keuangan SKPD....	148
	C. Langkah Penyusunan Laporan Keuangan PPKD ...	150
	D. Referensi.....	153
<b>BAB 15</b>	<b>ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>154</b>
	A. Definisi dan Tujuan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	154
	B. Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	155
	C. Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah.....	159
	D. Referensi.....	162

**TENTANG PENULIS.....163**

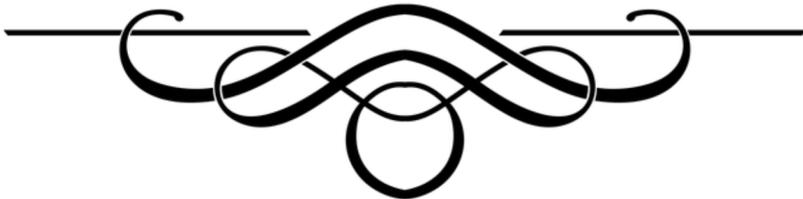
## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah.....	21
Tabel 2.	Format Laporan Perubahan SAL Pemerintah Daerah.....	22
Tabel 3.	Format Neraca Pemerintah Daerah.....	22
Tabel 4.	Format Laporan Operasional Pemerintah Daerah.....	23
Tabel 5.	Format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah.....	24
Tabel 6.	Format Laporan Arus Kas pemerintah Daerah.....	24
Tabel 7.	Dokumen Sumber Pencatatan Penerimaan Pembiayaan .....	68
Tabel 8.	Pencairan Dana Cadangan.....	69
Tabel 9.	Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan .....	69
Tabel 10.	Penerimaan Pinjaman Daerah .....	69
Tabel 11.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman .....	70
Tabel 12.	Penerimaan Piutang Daerah .....	70
Tabel 13.	Dokumen Sumber Pencatatan Pengeluaran Pembiayaan .....	71
Tabel 14.	Pengisian Dana Cadangan .....	71
Tabel 15.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.....	71
Tabel 16.	Pembayaran Pokok Pinjaman.....	72
Tabel 17.	Pemberian Pinjaman Daerah .....	72
Tabel 18.	Ilustrasi Pencatatan Metode Perpetual dan Metode Periodik.....	85
Tabel 19.	Pencatatan Metode FIFO .....	87
Tabel 20.	Penyajian Investasi.....	96
Tabel 21.	Ilustrasi Perhitungan Perolehan Tanah.....	110



# **AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH Pendekatan Berbasis Akrual**

Yadi Arodhiskara  
Irna Triannur Lubis  
Sariana Damis  
Muhammad Abdian Abdillah  
Darmawan  
Fachroh Fiddin  
Nanda Safarida  
Febriyani Damayanti  
Purtanto  
Achmad Fauzi  
Rukun Santoso  
Yasri Tarawiru  
Nuramalia Hasanah  
Nurwani  
Arham



# BAB 1

## TINJAUAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

**Dr. Yadi Arodhiskara, M.Ak.**

Universitas Muhammadiyah Parepare

### **A. Reformasi Akuntansi Pemerintah**

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang salah satunya dibuktikan dengan keinginan masyarakat umum untuk mewujudkan peningkatan akuntabilitas publik yang transparan dan akuntabel. Berkembangnya Akuntansi Sektor Publik di Indonesia maka hal yang paling utama dilakukan oleh pemerintahan, yaitu mewujudkan pertanggungjawaban terhadap masyarakat umum dan publik. Pemerintah pusat maupun daerah harus mampu mempertanggungjawabkan dan transparan terhadap penggunaan anggaran yang dilakukannya. Pemerintah daerah merupakan instansi sektor publik yang harus menyampaikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel (Indrayani & Widiastuti, 2020).

Inovasi dalam sistem akuntansi sektor publik di berbagai negara sangat tinggi, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini terjadi pasca reformasi 1998, tingginya tuntutan bagi entitas sektor publik, khususnya pada pemerintahan pusat dan daerah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan. Pemerintahan yang bersih akan melahirkan suatu sistem tata kelola keuangan yang baik dan benar, proses yang dapat dipertanggungjawabkan akan mendorong tingkat legitimasi yang tinggi bagi pemerintahan tersebut dalam menjalankan program pembangunannya.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang digunakan sebagai standar acuan dalam pelaksanaan sistem akuntansi pada pemerintah pusat dan daerah, maka dapat dijabarkan fungsi SAP sebagai berikut:

1. SAP dapat berfungsi menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai anggaran dan kegiatan keuangan K/L/PD, yang berguna sebagai dasar pengukuran kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.
2. Sistem akuntansi pemerintah dapat berfungsi menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan keuangan K/L/PD secara efisien.
3. SAP dapat berfungsi untuk menyediakan informasi terpercaya tentang posisi keuangan K/L/PD secara keseluruhan.
4. Sistem akuntansi pemerintah dapat berfungsi menjaga aset K/L/PD melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi umum.

#### **D. Referensi**

- Abdul, H. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim. 2012 Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Abdul, R. A. (2018). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Staf Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten).
- Arinta, Kustadi. 1996. Pengantar Akuntansi Pemerintahan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Baswir, Revrison. (2000). Akuntansi Pemerintahan Indonesia Edisi 3. Yogyakarta: BPFE.

- Bahtiar, Arif, Muchlis, Iskandar, 2002. Akuntansi Pemerintahan, Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Erlina, Rasdianto, 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Medan: Brama Ardian.
- Gade, M. (2000). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi SDM Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4, 1-16. <https://doi.org/10.18196/Rab.040148>.
- Kusnadi, S.M. dan Irmadariyani, R. (2002). Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate) (Prinsip, Prosedur, dan Metode), Malang: Universitas Brawijaya.
- Mustika, M., & Fadilah, S. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*.
- Muhammad Gade. 2000 .Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Widiatmoko, A. H. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi, Kapasitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Badan Pendapatan Daerah).

# BAB 2 | PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Irna Triannur Lubis, S.E., M.Si.  
Universitas Battuta

## A. Basis Akuntansi Pemerintahan

Prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), digunakan dalam rekening tahunan pemerintah dalam bentuk pelaporan aktivitas, akumulasi kewajiban, pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mensyaratkan bahwa prinsip akuntansi harus disajikan secara tunai bersama-sama dengan laporan tahunan, laporan kegiatan kegiatan didasarkan pada indikator pendapatan yang dicatat pada saat hak atas pendapatan muncul diselesaikan, bahkan jika uang tunai belum diterima di rekening kas umum pemerintah/daerah atau pelapor.

Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa penyusunan rekening tahunan pemerintah didasarkan pada perhitungan pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan ekuitas akrual. Akrual adalah “pencocokan pendapatan dan biaya pada periode di mana mereka dibuat”. Jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan laporan keuangan disajikan berdasarkan kas, entitas (ekonomi) harus menyajikannya sesuai dengan itu.

Basis akrual laporan kegiatan berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk menerima pendapatan terpenuhi, meskipun tidak ada uang yang diterima dalam rekening fiskal umum pemerintah/daerah atau pelapor, dan biaya diakui pada saat kewajiban timbul yang menyebabkan penurunan aset

tersebut dapat mencakup kehati-hatian untuk tidak melebih-lebihkan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan.

**Penyajian Informasi.** Penyajian informasi untuk tujuan akuntabilitas ini antara lain dilakukan dengan:

1. Memberikan informasi tentang keadaan sumber keuangan, kewajiban, dan modal negara.
2. Memberikan informasi tentang perubahan posisi sumber daya keuangan, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
3. Memberikan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan dana.
4. Memberikan informasi tentang pelaksanaan anggaran.
5. Memberikan informasi tentang bagaimana entitas pelapor membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan keuangan.
6. Memberikan informasi tentang kemampuan pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
7. Memberikan informasi yang berguna untuk menilai kemampuan entitas pelapor untuk membiayai operasinya.
8. Kepala unit, dan entitas akuntansi dan pelaporan, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyampaian laporan keuangan.

Komponen laporan keuangan pemerintah terdiri atas: Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); Neraca; Laporan Operasional (LO); Laporan Arus Kas (LAK); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## **D. Referensi**

- Mentu, E., Sondakh, J. J. (2016). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut. *Jurnal EMBA*, 4(1), 1392-1399.
- Simanjuntak, B. H. (2005). Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 1-15.

# BAB 3 | LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Sariana Damis, S.Ak., M.Ak.  
Universitas Muhammadiyah Parepare

## A. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas berupa informasi keuangan. Informasi yang seharusnya disajikan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah hendaknya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh stakeholder (Defitri, 2014).

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: Akuntabilitas; Manajemen; Transparansi; Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*); dan Evaluasi Kinerja (Imam, 2017).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan (PP No. 71, 2010) dan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-

## D.Referensi

- Defitri, S. Y. (2014). Eksplorasi Kebutuhan Stakeholder Terhadap Informasi Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Media Ekonomi*, 22(1), 53-72.
- Dwi Ratmono, Mahfud Sholihin, 2017. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Penerbit UPP STIM YKPN, Edisi Kedua Cetakan Pertama, April 2017.
- M. Arafat Imam G, 2017. Peran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengambilan Kebijakan Desentralisasi Fiskal. Peran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengambilan Kebijakan Desentralisasi Fiskal | BPKAD (bekasikota.go.id)
- M. Ramli Faud, SE., MM, 2015. Pengantar Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan I Agustus 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual pada Pemerintah Daerah.
- Siska Yulia Defitri, 2018. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita* 3(1), Februari 2018 (64-75).

# BAB 4

## STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Muhammad Abdian Abdillah, S.E., M.Ak.  
Universitas Muhammadiyah Parepare

### A. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (*due process*). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam Lampiran III.

Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (Saqinah, Hirmantono, & Nataliawati, 2020).

## D. Referensi

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rohman, F., & Muniroh, A. (2018). Implementasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrua! Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 2(2), 109-121.
- Saqinah, D. Z., Hirmantono, A., & Nataliawati, R. (2020). PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Rsud Ngimbang kabupaten Lamongan). *MELATI STIEKHAD*, 34(1), 39-39.
- Suwandi, S., Ardianingsih, A., Akadiati, V. A. P., Ismail, V., Nuwa, C. A. W., Adam, E., ... & Kusumastuti, R. (2022). Mengukur Kinerja Perusahaan melalui Analisis Laporan Keuangan.

# BAB 5

## AKUNTANSI PENDAPATAN

Darmawan, S.E., M.Si.  
Universitas Muhammadiyah Parepare

### A. Definisi dan Klasifikasi Pendapatan Pemda

Definisi pendapatan menurut SAP adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah (Rosmeri Elsy, 2016). Meskipun sama-sama menggunakan istilah pendapatan, namun pendapatan-LRA dan pendapatan-LO memiliki definisi, pengakuan, dan pengukuran yang berbeda. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 dalam PP 71 Tahun 2010, pendapatan-LRA didefinisikan sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sementara menurut PSAP 01, pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. (Dwi Ratmono, 2017).

Adapun Akuntansi Pendapatan Satker (M. Ramli Faud, 2015):

1. Transaksi pendapatan di Satker dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan Satker (PPK-Satker). Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh bendahara

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
10/5/15	SKPDKB	1.1.3.01.06	Piutang pajak hotel	1.700.000	
		8.1.1.06.01	Pendapatan pajak hotel-LO		1.700.000

#### d. Pencatatan-Pajak Lebih Bayar

Contoh: Tanggal 10 Mei 2015, dilakukan pemeriksaan atas pajak hotel yang dibayarkan oleh Hotel Mekar dan ditemukan adanya pajak lebih bayar sebesar Rp.1.700.000,-. Jurnal-LO yang diperlukan:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
10/5/15	SKPDKB	8.1.1.06.01	Pendapatan pajak hotel-LO	1.700.000	
		2.1.6.01.01	Utang kelebihan pembayaran pajak		1.700.000

## D.Referensi

- Elsye, R., Suwanda, D., Muchidin, U. (2016). *Dasar-Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Faud, M. R. (2015). *Pengantar Akuntansi Keuangan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri. *Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Akuntansi Pendapatan*. Retrieved November 18, 2022, from <https://www.slideshare.net/yoen2010/akuntansi-pendapatan-pemda>
- Ratmono, D., & Sholihin, M (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

# BAB 6

## AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

Fachroh Fiddin, S.E., M.Ak., CGAA.  
Politeknik Negeri Bengkalis

### A. Definisi dan Klasifikasi Belanja dan Beban PEMDA

Beban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan dalam Laporan Operasional (LO) dan disajikan dengan prinsip akrual serta melengkapi siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*). Secara umum beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Laporan Realisasi Anggaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebut belanja untuk semua pengeluaran dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode berjalan dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah serta belanja dalam LRA menggunakan anggaran berbasis kas.

Perbedaan antara beban dan belanja dalam akuntansi pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Beban	Belanja
1.	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual
2.	unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

langsung dikonsumsi secara langsung. Maka jurnal LO sebagai berikut:

Tanggal	No. Rek	Uraian	Debit	Kredit
27/6/20	1.xxx 2.xxx	Persediaan ATK Utang belanja ATK	4.000.000	4.000.000

Pada tanggal 20 Juli 2020 bendahara pengeluaran SKPD melakukan pembayaran dengan mekanisme LS dan pembayaran tersebut telah diterima oleh rekanan. Maka Jurnal LO sebagai berikut:

Tanggal	No. Rek	Uraian	Debit	Kredit
20/7/20	2.xxx 3.xxx	Utang belanja ATK RK PPK	4.000.000	4.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	No. Rek	Uraian	Debit	Kredit
20/7/20	5.xxx 0.xxx	Belanja ATK Perubahan SAL	4.000.000	4.000.000

Jurnal Resiprokal SKPKD

Tanggal	No. Rek	Uraian	Debit	Kredit
20/7/20	1.xxx 1.xxx	RK SKPD Kas di Kasda	4.000.000	4.000.000

Jika pada tanggal 30 Desember 2020 PPK SKPD melakukan perhitungan fisik (*Stock Opname*) terhadap persediaan ATK dan berdasarkan hasil *stock opname* didapati persediaan ATK sebesar Rp1.000.000,-. Maka jurnal penyesuaian LO- yaitu:

Tanggal	No. Rek	Uraian	Debit	Kredit
31/12/20	8.xxx 1.xxx	Beban ATK Persediaan ATK	3.000.000	3.000.000

## D.Referensi

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

Yesi, Mutia, Desmiyawati, dan Nur Azlina. Akuntansi Pemerintah Daerah. K-Media Yogyakarta. 2020.

Hamzah, Andy, Nur Aisyah. Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Stan Press. 2014.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dirjen Perimbangan Keuangan. Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

# BAB 7

## AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Nanda Safarida, M.E.  
IAIN Langsa

### **A. Definisi dan Klasifikasi Pembiayaan Pemerintah Daerah**

Akuntansi dari sisi fungsi merupakan aktivitas jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi kuantitatif mengenai data-data keuangan yang berguna bagi proses pengambilan keputusan. Sedangkan dari sisi prosesnya, akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan transaksi-transaksi yang sebagiannya bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya (Erlina et al., 2020). Secara umum akuntansi dibedakan menjadi akuntansi sektor swasta/komersial dan akuntansi sektor publik. Akuntansi pemerintahan daerah atau disebut juga akuntansi keuangan daerah adalah bagian dari akuntansi sektor publik yang difungsikan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas ekonomi di lingkungan pemerintahan daerah (Bastian, 2010).

Keberadaan akuntansi pemerintah daerah sejalan dengan semangat otonomi daerah yang harus mengelola keuangan daerah secara terpisah dari pemerintahan pusat dan sekaligus harus melaporkan hasilnya kepada publik secara transparan. Oleh sebab itu dibutuhkan standarisasi dalam pelaksanaannya agar seragam dapat digunakan di seluruh pemerintahan daerah (Reza, 2022; Ismatullah, 2010). Pada akuntansi pemerintah daerah, jenis transaksi dapat dirinci menurut struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun

## D. Referensi

- Afiah, Nunuy Nur. (2010). *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bastian, Andrian. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Effendi, Syahril. (2021). *Akuntansi Keuangan SKPD/SKPKD (PPKD) Pemerintah Daerah*. Batam: CV. Batam Publisher.
- Erlina, Omar Sakti Rambe, & Rasdianto. (2020). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: salemba Empat.
- Ismatullah, Dedi. (2010). *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2005). Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah. "Buletin Teknis Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah No.2. <http://www.ksap.org/sap/buletin-teknis-dan-interpretasi-psap/>, 24 November 2022.
- Masnila, Nelly. (2021). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Solok: CV. Mitra Cendikia Media.
- Republik Indonesia, (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011.
- Reza, Heru Kreshna. (2022). *Akuntansi Pemerintah*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Rianto & Puji Agus. (2015). *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

# BAB 8

## AKUNTANSI PERSEDIAAN

Febriyani Damayanti, S.E., Ak., M.Ak., CA., CIPSAS.  
Universitas Winaya Mukti Bandung

### A. Definisi dan Klasifikasi Persediaan PEMDA

Definisi persediaan dalam akuntansi pemerintahan dipengaruhi oleh karakteristik dari organisasi pemerintahan. Karakteristik pemerintahan memang hampir sama dengan organisasi pada sektor publik lainnya namun berbeda dengan perusahaan yang mengelola sumber daya ekonominya dengan tujuan untuk mencari laba. Apabila diklasifikasikan secara spesifik, tujuan utama dari entitas pemerintahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan. Sumber pendanaan organisasi sektor publik bukan bersumber dari laba operasi, tetapi melalui cara yang berbeda yaitu selain berasal dari sumber pendapatan daerah dapat pula berupa sumbangan atau donasi yang bersifat sukarela. Pada suatu entitas pemerintahan, cara seperti ini direalisasikan melalui penerimaan pajak atau retribusi.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka persediaan dalam akuntansi pemerintahan mempunyai definisi dan cakupan yang agak berbeda. Hal ini dijelaskan dalam aturan yang mengatur tentang akuntansi pemerintahan yaitu dapat dijelaskan pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 5 tentang akuntansi persediaan.

Pemerintah pun mengatur bagaimana pengelolaan dan pencatatannya dalam suatu Peraturan Pemerintah. Definisi Persediaan (Menurut Peraturan Pemerintah RI No 71 Th. 2010)

Berdasarkan perhitungan tersebut lalu dibuat jurnal sebagaimana table berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
1 Des	Persediaan Bahan Obat-obatan	30.000.000	
	Kas		30.000.000
	Belanja Persediaan Obat-obatan	30.000.000	
	Perubahan SAL		30.000.000
3 Des	Persediaan Bahan Obat-obatan	35.000.000	
	Kas		35.000.000
	Belanja Persediaan Obat-obatan	35.000.000	
	Perubahan SAL		35.000.000
18 Des	Beban Persediaan bahan obat-obatan	24.000.000 *)	
	Persediaan Bahan Obat-obatan		24.000.000
	Belanja Persediaan bahan Obat-obatan	24.000.000	
	Perubahan SAL		24.000.000
25 Des	Beban Persediaan bahan obat-obatan	27.000.000**)	
	Persediaan Bahan Obat-obatan		27.000.000
	Belanja Persediaan bahan Obat-obatan	27.000.000	
	Perubahan SAL		27.000.000
31 Des	Tidak ada Jurnal		

Selanjutnya dilakukan pengungkapan pada CALK sebagai berikut:

1. Metode pencatatan yang digunakan adalah metode FIFO perpetual.
2. Persediaan terdiri dari 40 dus persediaan obat-obatan berupa perban.

#### D. Referensi

Mursyidi. 2013. "Akuntansi Pemerintahan di Indonesia". Bandung: Refika Aditama.

- Nordiawan, Deddi dan Iswahyudi. 2009. "Akuntansi Pemerintahan". Jakarta: Salemba Empat.
- Hasanah, Nuramalia dan Fauzi, Achmad. (2017). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: In Media  
[http://sipeg.unj.ac.id/repository/upload/buku/AKUNTA\\_NSI\\_PEMERINTAHAN.pdf](http://sipeg.unj.ac.id/repository/upload/buku/AKUNTA_NSI_PEMERINTAHAN.pdf)

# BAB 9

## AKUNTANSI INVESTASI

**Purtanto, S.E.T., M.Si., Ak.**

Bagian Perekonomian, Sekretariat Daerah Kota Tegal

### **A. Definisi dan Klasifikasi Investasi PEMDA**

Guna mengoptimalkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat melakukan investasi. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (Peraturan Menteri Keuangan No. 223/PMK.05/2016). Pada prinsipnya akuntansi investasi pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah sama. Dalam pengelolaan keuangan pemerintah, investasi bukan merupakan prioritas utama. Apabila terdapat surplus anggaran pemerintah daerah dapat berinvestasi untuk memperoleh pendapatan dalam rangka manajemen kas. Beberapa istilah yang digunakan dalam Akuntansi Investasi antara lain:

1. Biaya investasi, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah selaku investor untuk memperoleh suatu investasi diantaranya: biaya untuk memenuhi aspek hukum, biaya perantara, biaya bank, dan biaya lainnya dari pasar modal.
2. Nilai investasi, merupakan perhitungan investasi yang disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas ekuitas dari entitas penerima investasi sejak perolehan awal investasi.

Tgl	Uraian	Debet	Kredit
05 Jan 20X5	Kas di Kas Daerah Investasi Jk Panjang Surplus Investasi	10.750	10.000 750
	Perubahan SAL Penerimaan Pembiayaan-hasil penjualan investasi	10.000	10.000

Akun-akun dalam ilustrasi jurnal tersebut untuk memberikan gambaran umum akuntansi investasi di pemerintah daerah, adapun penggunaan nama akun dapat berbeda menyesuaikan perubahan regulasi terkait dengan sistem akuntansi pemerintah daerah dan Bagan Akun Standar (BAS).

#### **D. Referensi**

- Bagjana, I.F. et al. (2021). *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Yrama Widya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2016 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016).

# BAB 10 | AKUNTANSI ASET TETAP

Dr. Achmad Fauzi, S.Pd., M.Ak.  
Universitas Negeri Jakarta

## A. Definisi dan Klasifikasi Aset Tetap PEMDA

Pengakuan atau pencatatan, klasifikasi, pengukuran atau penilaian, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap telah menjadi fokus utama akuntansi karena terdapat nilai signifikan dan kompleksitas tinggi dalam aset tetap. Hal ini bertujuan untuk pelaksanaan kewajiban penyusunan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah.

Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi aset tetap yang lebih lengkap dalam rangka pengambilan keputusan dibandingkan berbasis kas. Pengaturan terkait pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset tetap Pemerintah disajikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 (PSAP 07) Tentang Akuntansi Aset Tetap pada lampiran I.08 PP No. 07 Tahun 2010 dan Buletin Teknis No. 15 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual (Nurtetty Lamria Siringoringo).

Menurut PSAP 07 (PP 71 Tahun 2010) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kriteria lain yang harus dimiliki oleh suatu aset tetap adalah biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam

## D. Referensi

- KSAP. (2014). *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 Tahun 2014 : Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua*.  
<https://www.ksap.org/sap/buletin-teknis-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor-15/>
- Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Divy, et al. (2016, November). *Akuntansi Aset Tetap Pemerintahan Pusat dan Daerah : Makalah Akuntansi Pemerintah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia*.  
<https://id.scribd.com/document/333497732/AKPEM-Makalah-Akuntansi-Aset-Tetap-Kelompok-7>
- Hasanah, A., & Fauzi, A. (2016). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: iN Media.
- Kurniawan, A. (2022, September 15). From <https://www.gurupendidikan.co.id/aset-tetap/>
- Negeri, K. D. (2014, Desember 14). slideshare. From slideshare.net: <https://www.slideshare.net/yoen2010/akuntansi-asettetap-pemda-akrua-penuh>
- KSAP. (2014). *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 Tahun 2014 : Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua*.  
<https://www.ksap.org/sap/buletin-teknis-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor-15/>
- Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- JOGLOABANG. (2020, April 11). *Kebijakan Akuntansi Aset Tetap*. Retrieved from *Kebijakan Akuntansi Aset Tetap - Jogloabang*:  
<https://www.jogloabang.com/ekbis/kebijakan-akuntansi-aset-tetap>

# BAB 11

## AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Dr. Rukun Santoso, S.E., M.M., M.Si.  
Universitas Islam Jakarta

### A. Definisi dan Kontrak Konstruksi dalam Pengerjaan

Pernyataan standar konstruksi dalam pengerjaan bertujuan untuk menyeimbangkan perlakuan akuntansi untuk konstruksi yang belum selesai sesuai dengan metode biaya perolehan. Sementara, tujuan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan adalah untuk: (1) memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang konstruksi dalam pengerjaan; (2) melindungi transaksi konstruksi dalam pengerjaan melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten; dan (3) mendukung implementasi akuntansi konstruksi yang menciptakan informasi konstruksi dalam pengerjaan yang akuntabel dan sebagai dasar pengambilan keputusan (Manalu & Novita, 2022).

Entitas akuntansi yang melangsungkan sebuah pembangunan aset tetap (properti, pabrik) untuk kegiatan pemerintahan, kota, atau kepentingan masyarakat dalam jangka waktu tertentu, harus mempraktikkan standar konstruksi dalam pengerjaan; baik pembangunannya dilakukan secara mandiri atau melalui pihak ketiga. Pelaksanaan dalam hal kegiatan konstruksi tersebut biasanya bersifat jangka panjang, sehingga tanggal mulai dan berakhirnya kegiatan ini biasanya jatuh pada periode akuntansi yang berbeda (Suwandi, 2022).

**Ilustrasi 4:** Tanggal 31 Mei 2021, dinyatakan pembangunan gedung telah selesai.

Jurnal operasional:

Uraian	Debet	Kredit
Gedung	530.000.000	-
Uang Muka Pembangunan Gedung	-	130.000.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan-Gedung	-	400.000.000

Jurnal realisasi anggaran:

Uraian	Debet	Kredit
Belanja Modal- Gedung	530.000.000	-
Uang Muka Pembangunan Gedung	-	130.000.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan-Gedung	-	400.000.000

## D. Referensi

- Adriansyah, R. T., Pangestu, R., & Firmansyah, A. (2022). Penerapan ISAK 16 Pada Perjanjian Konsesi Jasa Studi Kasus: PT Indonesia Power. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(1), 69-80.
- Afiah, N. N. (2020). *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI pada Entitas Akuntansi: Konsep dan Aplikasi*. Prenada Media.
- Arifuddin, A., Paweroi, A., & Syarifuddin, S. (2020). PENGAKUAN PENDAPATAN KONTRAK DAN BIAYA KONTRAK BERDASARKAN PSAK NO. 34 PADA PT. MAKASSAR INDAH GRAHA SARANA. *ACCOUNTING JOURNAL*, 1(3), 138-146.
- Aripin, Z., & Negara, M. R. P. (2021). *Akuntansi Manajemen*. Deepublish.
- Djanegara, H. M. S., SE, A., & MM, C. (2017). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Teori, Praktik, dan Permasalahan*. Kesatuan Press.
- Fassa, F. (2020). *Metode Pengadaan Jasa Konstruksi Dan Proses Penawaran*. Podomoro University Press.
- Hansen, S. (2017). *Quantity Surveying: Pengantar Manajemen Biaya dan Kontrak Konstruksi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kustiani, I., Widyawati, R., & Warena, R. D. (2021). Analisis Pengelolaan Limbah Konstruksi dengan Skema Stepwise Incentive System dalam Rangka Penerapan Lean

- Construction pada Proyek Konstruksi di Lingkungan Universitas Lampung. *Prosiding SINTA 3 (2020)*, 3(2020).
- Manalu, G. C., & Novita, N. (2022). Apakah Sistem Pengendalian Internal Dapat Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Jasa Konstruksi?. *E-Prosiding Akuntansi*, 3(1).
- Mariyati, D. (2018). Prinsip Hukum dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak Engineering Procurement Construction (Kontrak EPC). *Yuridika*, 33(2), 188-211.
- Ningrum, D. A., Arifah, N. V., Darno, D., & Purnamasari, W. (2021). Evaluasi Pengakuan Pendapatan Jasa Kontrak Konstruksi Menurut PSAK No. 34 pada PT. Nastek Mustika Abadi. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(2), 70-77.
- PRASETYO, D. (2021). ANALISIS NILAI HASIL TERHADAP WAKTU PADA PROYEK KONSTRUKSI (Studi Kasus Proyek Pembangunan Rumah Susun Ponpes Hidayatullah Kota Bontang). *KURVA MAHASISWA*, 11(2), 760-775.
- Simorangkir, P. (2018). Implementasi PSAK 16 Pada Entitas Perbankan BUMN. *Equity*, 20(1), 83-96.
- Siswanto, A. B., & Salim, M. A. (2019). *Manajemen Proyek*. CV. Pilar Nusantara.
- Suwandi, S. (2022). Pengenalan Dasar Akuntansi 1 Suatu Pendekatan Siklus Akuntansi Usaha Jasa dan Dagang.
- Ulfi, E., Hartono, A., & Hidayah, N. (2022). Analisis Implementasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap PSAP No. 07 Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. *JAPP: JURNAL AKUNTANSI, PERPAJAKAN, DAN PORTOFOLIO*, 2(1), 56-62.

# BAB 12

## AKUNTANSI DANA CADANGAN

Yasri Tarawiru, S.E., M.Ak., Ak., CA., CTA., ACPA.  
Universitas Muhammadiyah Parepare

### A. Definisi dan Klasifikasi Dana Cadangan PEMDA

Pada bagian ini akan dibahas mengenai Akuntansi Dana Cadangan. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

1. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
2. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
3. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
4. sumber dana cadangan; dan
5. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Oleh karena itu, setelah mempelajari materi ini, kita diharapkan mampu memahami Akuntansi Dana Cadangan.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013).

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Feb-15	SP2D-LS 04/1/II/2015	1.4.1.01.01	Dana Cadangan - Pilkada	2.000.000.000	
		1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		2.000.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Feb-15	SP2D-LS 04/1/II/2015	7.2.1.01.01	Pengeluaran Pembiayaan - Pembentukan Dana Cadangan Pilkada	2.000.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		2.000.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggar (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006).

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Feb-15	SP2D-LS 04/1/II/2015	6.2.1.01.XX	Pengeluaran Pembiayaan - Pembentukan Dana Cadangan Pilkada	2.000.000.000	
		0.0.0.00.00	Perubahan SAL		2.000.000.000

## D. Referensi

- Ahmad Nasrudin. (2018). Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan, IX. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan (1).pdf
- Arfianty, A., & Virlyani, A. (2017). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Pengaruhnya terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 3(2).
- Vinsetlus. (2015). SAPD Dana Cadangan, 11. SAPD Dana Cadangan (123dok.com)

# BAB 13

## AKUNTANSI KEWAJIBAN

Nuramalia Hasanah, S.E., M.Ak.  
Universitas Negeri Jakarta

### A. Definisi dan Klasifikasi Kewajiban PEMDA

Standar akuntansi pemerintah atas kewajiban mengatur pengertian, pengakuan, penilaian dan pengungkapan aset pemerintah. Standar akuntansi pemerintah mendefinisikan kewajiban sebagai berikut: “kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah” (PSAP No. 08 Akuntansi Kewajiban).

Berdasarkan definisi tersebut kewajiban pemerintah merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu dalam bentuk penarikan pinjaman, perolehan hasil obligasi, atau perolehan barang/jasa dari pihak lain yang belum dibayar sehingga menimbulkan tagihan. Utang yang timbul tersebut harus dilunasi pemerintah dengan mengeluarkan sumber dayanya untuk pembayaran/ pelunasan utang tersebut.

Kewajiban atau utang adalah sesuatu yang memberikan beban kewajiban bagi pemilik di masa depan di mana pembayarannya dilakukan dengan mengorbankan aset. Kewajiban juga dapat didefinisikan sebagai utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Tiga karakteristik utama kewajiban atau utang adalah:

selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

Sebagai contoh, pemerintah mengganti utang lama sebesar Rp.50 miliar dengan utang baru senilai yang sama. Pencatatan tersebut adalah sebagai berikut:

Utang jangka panjang luar negeri	20.000.000.000	
Dana yang harus disediakan		20.000.000.000
Untuk pembayaran utang jangka panjang		
Dana yang harus disediakan	20.000.000.000	
Untuk pembayaran Utang jangka panjang luar negeri		20.000.000.000

Transaksi diatas juga berpengaruh terhadap penerimaan dan pengeluaran pembiayaan seperti penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pada umumnya. Demikian juga penerimaan dan pengeluaran uang tunai oleh pengelola keuangan.

#### **D. Referensi**

- Arif, Bahtiar. dkk. 2002. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasanah, Nuramalia dan Achmad Fauzi. 2017. Akuntansi Pemerintahan. Bogor : In Media
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2005. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi S.P., Maulidah R. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.

# BAB 14

## PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Nurwani, S.E., M.Ak., Ak., CA.  
Universitas Muhammadiyah Parepare

### **A. Pentingnya Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan PEMDA**

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Begitu juga dalam lingkup keuangan pemerintahan yang wajib menyajikan laporan keuangan atas dana yang didapatnya.

Tujuan pernyataan dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi) No. 1 adalah menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) yang selanjutnya disebut "Laporan Keuangan" agar dapat dibandingkan, baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan perusahaan lain.

Laporan keuangan dalam lingkup pemerintahan diatur jelas berdasarkan aturan atau ketentuan hukum. Prinsip penyajian laporan keuangan pemerintahan sama dengan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan akuntansi, yang membedakan adalah komponen dan struktur laporan keuangannya.

dengan transaksi transitoris disini adalah transaksi yang dilakukan Pemdateta piungnya bukan hak Pemda, melainkan hak pihak ketiga, sehingga Pemda disini sifatnya hanya perantara. Contoh transaksi transitoris adalah pemotongan pajak yang dilakukan Pemda, seperti pemotongan pajak, IWP, Taperum, dan lainnya yang serupa.

## 9. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## D.Referensi

- Arfianty, A., & Virlayani, A. (2017). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Pengaruhnya terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 3(2).
- Dani Suluh. (2019). Langkah-langkah Menyusun Laporan Keuangan SKPD (Basis Akruar).
- Mursyidi. (2010). Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama 3. MAKALAH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN.pdf (kemendag.go.id).
- Nordiawan, Dedi. (2010). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Widyawati Sudirman (2022). Penyusunan Laporan Keuangan PPKD BAB VI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKD - PDF Free Download (adoc.pub).

# BAB 15

## ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Dr. Arham, S.E., M.Ak.

Universitas Muhammadiyah Parepare

### A. Definisi dan Tujuan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah yang melibatkan beberapa sector rekening laporan keuangan.

Analisis laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan yang untuk mendapatkan informasi kondisi keuangan pemerintah daerah dari beberapa sektor rekening laporan keuangan.

Tujuan analisis laporan keuangan pemerintah daerah ini adalah untuk mengetahui: (1) Kondisi keuangan pemerintah daerah serta perubahan-perubahannya; (2) Kemampuan

## 5. Belanja Modal

Permasalahan penyajian belanja modal terjadi pada 22 pemerintah daerah antara lain:

- a. Kelebihan pembayaran belanja modal yang terjadi karena kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, pekerjaan tidak dilaksanakan, pembayaran melebihi prestasi pekerjaan, dan indikasi permasalahan harga belum dipulihkan dengan penyeteroran ke kas daerah.
- b. Realisasi belanja modal tanah atas ganti rugi lahan dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan.
- c. Realisasi belanja modal JIJ untuk pembayaran utang belanja dilakukan tidak didukung dengan pengujian sesuai dengan spesifikasi hasil pekerjaan dan direalisasikan melampaui anggaran.
- d. Realisasi belanja modal melebihi realisasi fisik dan tidak didukung dengan kontrak pekerjaan yang masih berlaku serta barang hasil pengadaan belum diterima oleh pemerintah daerah.

## D. Referensi

- BPK RI. (2022). Ikhtisar Pemeriksaan Semester Retrieved, Desember 5 2022, From <https://www.bpk.go.id/ihps>
- Mahmudi (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

## TENTANG PENULIS



### **Dr. Yadi Arodhiskara, M.Ak.**

Lahir di Parepare pada tanggal 25 Juli 1976. Penulis adalah Dosen Tetap Yayasan pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare (FEB UM Parepare). Sejak tahun 2020 diamanahkan menjadi Dekan FEB UM Parepare. Pendidikan S1 di UM Parepare, S2 (2012) dan S3 (2021) pada Universitas Muslim Indonesia Makassar. Penulis aktif melakukan pendampingan dan penelitian diantaranya Pendampingan Ekonomi Lokal Program Kementerian PUPR-Bank Dunia (2011), Analisis Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menjawab Kemiskinan (2015), Naskah Akademik Penyusunan Kajian Potensi Pajak Hiburan Malam Kota Parepare (2017). Pada tahun 2021 menerbitkan buku Pengelolaan Keuangan Daerah.

Email: [yadhi01@gmail.com](mailto:yadhi01@gmail.com)



### **Irna Triannur Lubis, S.E., M.Si.**

Penulis merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Universitas Battuta sejak tahun 2019. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya UKM mandiri di era revolusi industri 4.0, Bisnis online dimasa pandemik, UMKM bangkit!. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.

Email: [irnatriannurlubis@gmail.com](mailto:irnatriannurlubis@gmail.com)



**Febriyani Damayanti, S.E., Ak., M.Ak., CA., CIPSAS.**

Penulis merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Universitas Winaya Mukti sejak tahun 2010. Sebagai seorang yang mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga merupakan praktisi di pemerintahan serta pernah berpraktek mengelola berbagai posisi di perusahaan manufaktur, koperasi dan kantor akuntan sejak tahun 1999. Berbagai kegiatan dilakukan oleh penulis termasuk diantaranya penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.

Email: [ipopfebri@gmail.com](mailto:ipopfebri@gmail.com)



**Purtanto, S.E.T., M.Si., Ak.**

Penulis merupakan PNS pada Sekretariat Daerah Kota Tegal sejak tahun 2006, dengan tugas pokok sebagai pembina BUMD. Saat ini penulis juga dipercaya menjadi Dewan Pengawas di sebuah BPR milik Pemerintah Daerah. Disela-sela aktivitasnya penulis menjadi dosen tetap di PTS dan Tutor Online pada Jurusan Akuntansi Universitas Terbuka. Mata kuliah yang pernah diampu antara lain: Auditing I, Perpajakan, Sistem Informasi Akuntansi, Akuntansi Keuangan Lanjutan I, Auditing II, Akuntansi Keuangan Lanjutan II, Teori Akuntansi, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Analisis Informasi Keuangan, Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, Hukum Pajak, Audit Manajemen. Untuk meningkatkan kompetensi penulis aktif mengikuti seminar, pelatihan maupun diklat.

Email: [purtanto\\_akt@yahoo.co.id](mailto:purtanto_akt@yahoo.co.id)



**Dr. Achmad Fauzi, S.Pd., M.Ak.**

Penulis merupakan Dosen Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Syariah pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sejak tahun 2010. Penulis merupakan alumni program Doktor Keuangan syariah dari Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Penulis juga merupakan praktisi keuangan di PT Karya Nassa Abadi. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya adalah, Akuntansi Syariah, Akuntansi Pemerintah, Komputerisasi Akuntansi dan Etika Bisnis dan Profesi. Sejak S1 aktif di berbagai organisasi intra kampus baik di Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat jurusan maupun tingkat Universitas. Saat ini aktif di organisasi ISNU (Ikatan Sarjana NU) wilayah DKI Jakarta dan ketua pengurus komisi IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam). Berbagai artikel jurnal pernah dituliskannya antara lain *"The Influence Of Return On Assets And Firm Size To Sukuk Rating, evidence from Indonesia and Malaysia"* terbit di Web of Science (WOS). Lalu *"Efficiency Analysis Of Islamic Insurance Industry In Indonesia Using Data Envelopment Analysis Method"* yang dipresentasikan di International Conference on Law and Justice di Kuala Lumpur Malaysia. Serta *"The Influence of Company Size and Solvency of the Timeliness Audited Financial Statement at Manufacturing Companies Listed on IDX"* yang dipresentasikan di SIBR Hongkong dan beberapa artikel lain yang terbit di berbagai jurnal.

Email: [Fauzifeunji@gmail.com](mailto:Fauzifeunji@gmail.com)



**Dr. Rukun Santoso, S.E., M.M., M.Si.**

Penulis lahir di Lamongan, 18 Juni 1959. Menekuni dunia manajemen sejak menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Administrasi Niaga lulus pada tahun 1997, Gelar Magister diperoleh dari Universitas Indonesia jurusan Ilmu Administrasi Fiskal lulus tahun 2003. Sedangkan gelar Doktor diraihinya di Universitas Pancasila Jurusan Ilmu Ekonomi (Strategi Bisnis) lulus tahun 2020. Dalam perjalanan karirnya, beliau

menjadi direktur keuangan di perusahaan BUMN dan juga swasta. Penulis juga aktif dalam dunia politik dan pernah menjadi Ketua Fraksi DPRD DKI Jakarta. Selain itu aktif di berbagai organisasi, diantaranya ketua umum ASPEKINDO, Wakil Ketua di DPP HKTI, Wakil Ketua SAHI, Wakil Ketua ISEI DKI Jakarta, Dewan Pembina Masika ICMI, Dewan Pertimbangan Iluni Universitas Indonesia, Dewan Pembina di Yayasan Wakaf Ummul Mukminin, Wakil Ketua Koperasi KSU SAHI MAJU BERSAMA, Dewan Pertimbangan K-MERSII, Sekarang aktif menjadi dosen tetap di Program Pascasarjana Universitas Islam Jakarta, dosen terbang di Pascasarjana Institut STIAM, dosen terbang di Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila dan sebagai dosen terbang di berbagai kampus lainnya, aktif dalam menulis buku, jurnal nasional maupun internasional.

Email: [rukunsantoso1859@gmail.com](mailto:rukunsantoso1859@gmail.com)



**Yasri Tarawiru, S.E., M.Ak., Ak., CA., CTA., ACPA.**

Penulis lahir di Palopo, 31 Oktober 1978 merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Parepare sejak tahun 2008. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga merupakan bagian dari Biro Keuangan Universitas Muhammadiyah Parepare. Saat ini penulis tinggal di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pendidikan tinggi ditempuh mulai dari S1 di Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi, Universitas Hasanuddin (UNHAS), Pascasarjana di Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia (UMI), dan meraih gelar Master Akuntansi. Selain menempuh pendidikan formal, penulis juga pernah menjadi anggota Tim Audit Internal pada Unit Pengendalian Internal (UPI) pada Universitas Muhammadiyah Parepare. Aktivitas penulis saat ini selain mengajar pada jenjang sarjana Prodi Akuntansi juga

sebagai Kepala bagian keuangan pada Universitas Muhammadiyah Parepare.

Email: [yasri.se.ak@gmail.com](mailto:yasri.se.ak@gmail.com)



**Nuramalia Hasanah, S.E., M.Ak.**

Penulis merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta sejak tahun 2008. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya Akuntansi Pemerintah, Manajemen Perpajakan, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Perpajakan, dan Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada Pelatihan tertentu. Penulis juga memiliki keanggotaan aktif Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sudah mengikuti beberapa sertifikasi diantaranya adalah Sertifikasi asesor tatap muka, sertifikasi metodologi pengajaran level 4, sertifikasi pendamping UMKM, Sertifikasi kewirausahaan, sertifikasi pajak dan NNLP.

Email: [nuramalia@unj.ac.id](mailto:nuramalia@unj.ac.id); [amal17lia@gmail.com](mailto:amal17lia@gmail.com)



**Nurwani, S.E., M.Ak., Ak., CA.**

Penulis merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Parepare sejak tahun 2018. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. lahir di Parepare, 13 Juni 1970. Saat ini penulis tinggal di kota Parepare, Sulawesi Selatan.

Pendidikan tinggi ditempuh mulai dari S1 di Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi, Universitas Hasanuddin (UNHAS), Pascasarjana di Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia (UMI), dan meraih gelar Master Akuntansi. Aktivitas penulis saat ini, selain mengajar pada jenjang S1 Prodi Akuntansi juga bertugas sebagai Kepala Biro Keuangan pada Universitas Muhammadiyah Parepare. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.

Email: [whanynur@gmail.com](mailto:whanynur@gmail.com)



**Dr. Arham, S.E., M.Ak.**

Penulis merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Parepare sejak tahun 2010. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, saat ini penulis mengemban amanah tugas tambahan dosen sebagai Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Parepare. selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga merupakan praktisi di perusahaan PT. Sinar 12. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.

Email: [arhamsemak@gmail.com](mailto:arhamsemak@gmail.com)